

B A B I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Liberalisme ekonomi lahir sebagai kritik terhadap dominannya peran negara atas kontrol politik dan pengaturan ekonomi yang menyeluruh. Kontrol pemerintah, yang terkadang menggunakan kekerasan ataupun tindakan yang represif dapat mengancam kebebasan individu, yang menjadi landasan filosofi liberalisme. Menurut kaum liberalisme, pihak yang berkuasa atau yang memerintah akan menggunakan segala cara dalam mempertahankan kedudukannya, termasuk memanipulasi dukungan melalui penyediaan berbagai keuntungan bagi kelompok masyarakat tertentu. Hal ini tentu saja dapat mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, kaum liberalisme menghendaki adanya suatu keadaan ekonomi yang bebas dari intervensi pemerintah, suatu situasi dimana setiap orang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan meraih keuntungan. Kaum liberalisme mempercayai pada adanya mekanisme pasar yang merupakan sumber kemajuan, kerjasama dan kesejahteraan. Campur tangan politik dan peraturan negara, sebaliknya, dianggap merupakan suatu kemunduran, tidak ekonomis, serta berpotensi dapat menyebabkan konflik¹.

Namun, sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau *Great Depression*), hingga awal tahun 1970-an, mengakibatkan konsepsi liberal kehilangan pijakan. Kehancuran ekonomi akibat peperangan,

¹ Gilpin, 1987; sebagaimana dikutip dalam Robert Jackson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, 2002, Duta Pustaka, hal. 225

yakni Perang Dunia Kedua mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan liberalisme dalam menjawab tuntutan zaman. Sejak saat itu, wacana negeri industri didominasi oleh wacana politik sosial demokrat dengan argumennya tentang negara kesejahteraan, yakni salah satu tugas penting pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dengan penyediaan jaminan sosial yang memadai, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Konsep negara kesejahteraan ini digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan pekerjaan², yang lebih dikenal sebagai kebijakan *full employment*. Pada tahun 1946, Amerika Serikat sebagai negara besar yang mendukung konsep ekonomi Negara Kesejahteraan (Keynesian) mengeluarkan *Employment Act* yang mengharuskan pemerintah berbuat untuk tujuan penciptaan lapangan kerja yang penuh. Negara-negara Barat lainnya membangun perekonomian mereka pasca perang, dan sangat tergantung pada bantuan Amerika Serikat, segera mengadopsi sebuah model serupa, kepemilikan negara atas industri utama dan pemerintahan yang intervensionis, yang kemudian diikuti oleh sebagian besar negara-negara sedang berkembang³.

Kemenangan strategi ekonomi Keynesian tidak berlangsung lama. Pada akhir tahun 1973 kondisi ekonomi dunia berubah drastis dan terjebak dalam resesi

² Neoliberalisme, <http://www.wikipedia.org/wiki/neoliberal+neoliberalisme>, direkam pada tanggal 27 september 2006.

³ Negara-Negara Berkembang Mengalami Krisis Kapitalisme Global & Kemajuan Demokrasi. Alania

ekonomi yang disebabkan karena krisis minyak, hal tersebut menuntut model baru manajemen ekonomi. Pada tahun 1979-1980 Perdana Menteri Inggris, Margareth Thatcher, yang merupakan politisi Kanan Baru mendukung strategi pasar bebas dan menolak intervensi negara dalam perekonomian internasional. Ideologi pasar bebas berdasarkan pada pandangan ekonom Milton Friedman dan Frederich Hayek. Mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu mengalokasikan barang dan jasa secara lebih efektif dibandingkan yang bisa dilakukan oleh negara.

Kepemimpinan Thatcher membawa perubahan besar dalam sejarah ekonomi internasional. Kebijakan-kebijakan ekonomi Keynesian yang menghendaki intervensi pemerintah digantikan oleh kebijakan yang sebaliknya, anti intervensi pemerintah, yang dikenal sebagai neoliberalisme. Pada waktu itu, Thatcher menghapus kewajiban negara memikul tanggung jawab terhadap negara yang tidak produktif, meminggirkan komitmen pemerintah mewujudkan *full employment*, memangkas secara radikal subsidi-subsidi sosial, dan sebagai gantinya pemerintah mementingkan pelayanan terhadap swasta, melakukan pemotongan pajak, menjalankan program privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Asumsi penerapan neoliberalisme akan membawa kemandirian, dan perusahaan besar non-negara akan memberikan tetesan ke bawah (*trickle down*) yang akan membawa pada kesejahteraan ekonomi, menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk membangun perekonomian mereka setelah dunia dilanda resesi ekonomi akibat melambungnya harga minyak dunia yang mengakibatkan naiknya biaya produksi.

Neoliberalisme semakin menjadi hal yang *debatable*, didorong oleh berbagai gerakan anti-neoliberalisme. Rongrongan agen neoliberalisme terhadap negara berkembang untuk menganut ideologi ini menjadi sasaran kritik terhadap neoliberalisme sebagai agenda politik dan ekonomi negara super power yang menghendaki universalisasi pasar bebas pun semakin tidak terelakkan. Selain itu, Neoliberalisme kini menjadi *discourse* yang dominan dalam Studi Pembangunan maupun Ekonomi Politik Internasional. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis termotivasi untuk membahas mengenai Neoliberalisme dalam skripsi ini, dengan judul "*Krisis Demokrasi Dalam Kepemimpinan Neoliberalisme (Kritik Noam Chomsky Terhadap Neoliberalisme)*"

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian penulisan ini yaitu ingin memberikan gambaran tentang:

Pertama, untuk menganalisa pandangan Noam Chomsky terhadap prinsip-prinsip ekonomi Neoliberalisme dan dampaknya terhadap demokrasi

Kedua, juga mempunyai tujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis peroleh di bangku kuliah. Teori apa yang pantas untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung.

Ketiga, tujuan penulisan skripsi ini adalah syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah:

Francis Fukuyama, dalam tulisannya yang berjudul *Akhir Sejarah? Yang* dimuat di *The National Interest* tahun 1999⁶, berpendapat bahwa berakhirnya Perang Dingin bukanlah suatu perguliran periode tertentu dari sejarah semata, melainkan suatu akhir sejarah: yakni, titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi liberal Barat sebagai konsensus bersama atas bentuk final pemerintahan umat manusia. Kemenangan Barat atas Perang Dingin menunjukkan kemenangan ide Barat, yang merupakan bukti kuat dari pudarnya semua sistem alternatif yang ada bagi liberalisme Barat. Lebih lanjut, menurut Fukuyama kemenangan ide Barat tersebut dapat dilihat dari fenomena merebaknya konsumerisme, serta dimulainya gerakan reformasi yang signifikan di dua negara komunis terbesar, Cina dan Rusia. Pendapat Fukuyama ini sekaligus meruntuhkan perkiraan sebelumnya yang menyatakan bahwa dunia sedang menuju "akhir ideologi" atau perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan menuju kemenangan liberalisme ekonomi dan politik

Meskipun Fukuyama mengakui bahwa kemenangan tersebut baru terjadi di dataran ide atau kesadaran dan belum genap dalam dunia nyata atau materiil, serta universalisasi liberalisme akan mendapat tantangan serius di negara-negara Dunia Ketiga yang sarat dengan konflik, Fukuyama berkeyakinan kuat bahwa ada alasan-alasan kuat untuk percaya bahwa yang ideal yang pada akhirnya akan mengatur dunia materi⁷. Keyakinan Fukuyama ini dilandaskan pada filosofi

⁶, *Amerika dan Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

⁷ Fukuyama mengikuti pendapat Hegel yang menyatakan bahwa semua perilaku umat manusia dalam dunia materi berakar pada sebuah tahapan kesadaran yang mendahuluinya. Kesadaran yang dimaksud ada dalam dunia ide yang dalam pengertiannya dipahami (paling tepat) sebagai

liberalisme yang mengakui dan melindungi hak universal manusia akan kemerdekaan melalui sistem hukum. Kesadaran akan perlunya perlindungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan manusia akan membentuk dunia materinya sendiri, yakni suatu dunia materi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ideologi tersebut, yakni liberalisme. Kesadaran yang memungkinkan pertumbuhan liberalisme dapat dijamin oleh berlimpahnya ekonomi pasar bebas modern, karena pasar bebas merupakan suatu pengejawantahan akan pengakuan kebebasan manusia dalam mengejar kepentingan materi mereka. Walaupun Fukuyama tidak sepenuhnya sependapat dengan Hegel, bahwa liberalisasi ekonomi dengan sendirinya menghasilkan politik liberal, namun Fukuyama percaya bahwa ekonomi maupun politik saling mempengaruhi satu sama lain dalam perwujudan negara liberal.

Meskipun pernyataan Fukuyama mengenai kemenangan liberalisme sebagai satu-satunya ideologi dunia yang kemudian dinyatakan sebagai *Endisme*⁸ serta perang antara negara liberal semakin mustahil tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Samuel P. Huntington, namun kemenangan ideologi liberalisme kini semakin nyata, walaupun ia bukanlah akhir dari sejarah⁹. Gelombang demokrasi yang

ideologi, yakni agama, budaya, dan nilai-nilai moral yang kompleks yang menyangga masyarakat. Fenomena-fenomena seperti kekalahan Fasisme Nazi, kehancuran Uni Soviet sebagai negara komunis, dan kejayaan ekonomi Cina yang membawa pada reformasi politik Cina yang kian condong terhadap prinsip-prinsip liberalisme menjadikan ideologi-ideologi selain liberalisme kehilangan daya tariknya. Namun sebaliknya kejayaan ekonomi, dan pelimpahan materi di negara-negara maju liberal menjadi daya tarik terhadap liberalisme itu sendiri, sekaligus telah memupuk dan menjaga liberalisme dalam lingkup politik.

⁸ *Endisme*, dalam *Amerika dan Dunia* adalah sebuah keyakinan bahwa sebetuk lingkup pengetahuan dan masa, terutama sesuatu yang negatif, telah berakhir. Kata *Endisme* datang dari Samuel P. Huntington sendiri, yang terdapat dalam tulisannya *Tak Ada Jalan Keluar: Kesalahan-Kesalahan Endisme*, yang dimuat pertama kalinya dalam *The National Interest*, 1989.

⁹ Menurut Huntington, sebuah ideologi selalu memiliki kemungkinan mengalami sebuah

melanda Dunia Ketiga yang menuntut suatu reformasi ekonomi dan politik kian menerpa dunia. Teori Pembangunan yang juga melanda negara-negara Dunia Ketiga, yang memerlukan liberalisasi ekonomi dan politik menjadikan universalisasi paham liberalisme semakin tidak terbendung. Disisi lain, Huntington mengakui bahwa negara-negara bangsa didunia pada saat ini sedang bergerak menuju demokrasi liberal, yang berimplikasi pada penguatan komitmen terhadap pasar bebas, dimana ia dipercayai dapat menjamin kebebasan individual dan hak-hak asasi manusia yang akan menuntun pada jalan demokrasi liberal itu sendiri.

Selanjutnya Huntington meragukan demokrasi liberal berjalan tanpa hambatan¹⁰ sebagaimana yang dikemukakan oleh Fukuyama. Adanya arus balik dari demokrasi ke otoritarianisme, maupun sebaliknya di negara-negara berkembang sejak awal abad ke-19 sampai tahun 1970-an serta bertambahnya negara-negara demokratis namun berpola tidak teratur¹¹, semakin menguatkan pendapat Huntington bahwa demokrasi liberal selalu terancam, bahkan ada kemungkinan untuk kembali pada otoritarianisme, sebagaimana yang terjadi pada

akan sangat mungkin akan kehilangan pamor dalam satu generasi, namun ia bisa muncul lagi dengan kekuatan yang diperbarui dalam satu atau dua generasi berikutnya. Hal ini dapat terlihat dari sejarah ideologi itu sendiri, misalnya sejarah liberalisme klasik, yang kemudian diganti oleh Proteksionisme, dan akhirnya kemunculan neoliberalisme pun menggantikannya. Alasan kedua adalah bahwa kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan ideologi-ideologi baru, karena karakter masyarakat dan bangsa-bangsa yang dinamis, bisa dibilang akan terus berkembang.

¹⁰ Dalam pandangan Huntington, penerimaan universalisasi demokrasi liberal tidak menghindarkan konflik-konflik di dalam liberalisme. Sejarah ideologi adalah sejarah perpecahan. Pertempuran antara mereka yang memiliki versi yang berbeda dari suatu ideologi (yang sama) seringkali lebih sengit dan lebih beringas daripada pertempuran antara mereka yang menganut ideologi yang sepenuhnya berbeda. Contoh kasus ini bisa dilihat dari peristiwa perbedaan pendapat soal wujud Trinitas dalam agama Kristen pada masa Kekaisaran Byzantium.

¹¹ Maksud dari pola tidak teratur ini adalah perkembangan demokratisasi di suatu negara, yang maju satu langkah ke depan, dan di suatu kali mengalami kemunduran yang cukup signifikan juga. Misalnya, suatu negara berhasil mencapai demokrasi secara prosedural, yakni penyelenggaraan pemilu, namun pada waktu yang sama masih banyak terjadi pelanggaran asas-asas demokrasi,

ekonomi dari institusi keuangan internasional, seperti IMF. Kemunculan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan, baik secara ekonomi maupun politik sejak akhir Perang Dunia II, juga memiliki peranan besar dalam penyediaan infrastruktur bagi perluasan ide-ide liberal, termasuk dalam kancah ekonomi internasional. Penyediaan, maupun pemerayaan serta perluasan infrastruktur ini didukung secara politik maupun ekonomi bagi sistem baru ekonomi internasional yang berprinsip liberal.

Sejak tahun 1990-an, para aktivis menggunakan kata 'neoliberalisme' untuk penyebutan liberalisasi pasar dan kebijakan pasar bebas. Kata 'neoliberalisme' sering dipertukarkan dengan kata 'globalisasi'. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat beberapa ilmuwan menyebutkan definisi globalisasi sebagai pertumbuhan aliran perdagangan dan investasi antara negara secara besar-besaran. Globalisasi ekonomi dianggap akan mendorong kemakmuran serta demokrasi, yang merupakan tujuan neoliberalisme.

Globalisasi ekonomi yang merupakan pengintegrasian negara-negara secara ekonomi kedalam suatu sistem ekonomi bersama, membawa pada konsekuensi penerapan kebijakan yang sama pula. Misalnya saja, untuk mendukung kemajuan ekonomi bersama, setiap negara harus membuka pasar seluas-luasnya serta memberlakukan pasar yang tidak diskriminatif. Hal ini bertujuan agar perdagangan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut sering dikenal dengan istilah liberalisasi pasar. Liberalisasi pasar merupakan salah satu ciri neoliberalisme. Dengan demikian, neoliberalisme menjadi sistem

menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme. Hal ini demi pencapaian kepentingan bersama, yakni perekonomian yang membebaskan individu untuk bertindak dan memakmurkan rakyat. Jika tidak ada kesepakatan akan suatu sistem yang sama, tentunya integrasi tidak akan terjadi, namun yang terjadi adalah kehancuran ekonomi karena persaingan yang anarki.

Karakteristik umum neoliberalisme yakni keinginan untuk mengintensifkan dan ekspansi pasar dengan meningkatkan jumlah, frekuensi, serta formalisasi transaksi perdagangan. Sedangkan tujuan universal neoliberalisme adalah menjadikan setiap tindakan manusia sebagai sebuah transaksi pasar, atau dengan kata lain mencoba menerapkan prinsip transaksi ekonomi pada semua bidang relasi sosial¹⁷. Neoliberalisme bukanlah sekedar suatu teori ekonomi, tetapi ia juga sebuah aliran filsafat, yang fenomenanya dapat terlihat dari perilaku-perilaku masyarakat, individu dan para pekerja.

Asumsi dasar dari neoliberalisme adalah manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*), dimana segala tindakan manusia, baik sosial, hukum, dan sebagainya didasarkan atas perhitungan ekonomi atau kalkulasi untung-rugi sebagaimana yang terjadi dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, hubungan-hubungan manusia dengan manusia lainnya menggunakan konsep tolak ukur ekonomi.

Dalam bidang ekonomi politik, neoliberalisme berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat dicapai, bila mekanisme pasar dibiarkan bebas. Artinya, pemerintah tidak lagi berperan dalam regulasi distribusi

ataupun aliran barang, jasa maupun modal. Pasar dipercayai memiliki mekanismenya sendiri melalui hukum penawaran dan permintaan, yang akan menstabilisasi pasar itu sendiri sehingga akhirnya tercipta pasar persaingan sempurna, dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan berkompetisi didalamnya.

Untuk mendorong terjadinya pasar persaingan sempurna tersebut, pasar haruslah terbebas dari segala bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengenai pajak yang rendah atau tanpa-tarif agar tercipta pasar bebas (*free trade*). Globalisasi memungkinkan terjadinya pasar bebas antara negara-negara. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju memudahkan transaksi perdagangan antar negara. Tidak ada lagi batasan negara maupun ruang dan waktu dalam mengalirkan modal, barang dan jasa.

Semakin bebasnya pasar internasional, memungkinkan suatu perusahaan mendirikan pabriknya dinegara lain, yang merupakan daerah pasar mereka, serta dekat dengan bahan mentah produksi. Perusahaan ini disebut perusahaan multinasional (*Multinational Corporations/MNCs*). Keuntungan bagi negara yang menerima perusahaan ini adalah penanaman investasi serta penyerapan tenaga kerja, yang dianggap mampu mendorong perbaikan ekonomi di negara tersebut.

Wacana neoliberalisme pun kini semakin mengglobal seiring gencarnya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Neoliberalisme menjadi pijakan ekonomi bersama dalam membangun perekonomian yang

diri terhadap pasar global, dan semakin berpartisipasi dalam perekonomian global. Neoliberalisme telah menjadi konsensus layaknya demokrasi liberal, sebagaimana yang dinyatakan oleh Francis Fukuyama yang disebutkan di awal penulisan.

Namun demikian, pengglobalan neoliberalisme tidak serta merta berjalan tanpa hambatan. Para anti-neoliberalisme semakin menyerang neoliberalisme, dengan dalih paham ini telah menyengsarakan rakyat dunia. Rezim ekonomi neoliberalisme dengan prinsip pasar bebasnya tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, standar hidup dan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Selama lebih dari satu dekade ekonomi internasional dibawah rezim neoliberalisme, dunia dihadapkan pada semakin meningkatnya ketidaksetaraan dalam pendapatan antara negara kaya (negara maju) dan negara-negara Dunia Ketiga, yang pada umumnya adalah negara miskin, meluasnya kemiskinann serta krisis ekonomi di berbagai negara yang telah menjadi epidemi. Neoliberalisme telah menimbulkan persoalan-persoalan serius dalam pemerataan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi negara pengusung ideologi Neoliberalisme, bahkan di negara super power seperti Amerika Serikat pun mengalami perluasan kemiskinan.

Kepercayaan yang luar biasa para Neoliberalis terhadap mekanisme pasar yang diyakini dapat mendorong lahirnya demokrasi liberal serta dampak-dampak positif lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hanyalah merupakan apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai *utopia free trade faith*¹⁸, seperti layaknya Marxisme di masa lampau. Kepercayaan yang kuat terhadap

¹⁸ Pierre Bourdieu, 'Kritik Terhadap Neoliberalisme: Utopia Eksploitasi Tanpa Batas Menjadi

neoliberalisme, tidak hanya dimiliki oleh mereka yang diuntungkan secara finansial olehnya, seperti pemilik dan manager perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi juga pada para pejabat tinggi dan politisi, yang mendapatkan pembenaran dari paham Neoliberal yang menyembah kekuatan pasar atas nama efisiensi ekonomi. Neoliberalisme dirumuskan menjadi program politik dengan bantuan teori ekonomi melalui perubahan semua bentuk kebijakan politik dengan tujuan mempertanyakan semua struktur kolektif yang menjadi hambatan bagi logika pasar murni.

Tidak hanya menyebabkan meluasnya kemiskinan dan keterpurukan ekonomi dunia yang semakin timpang, Neoliberalisme menjadi sebuah ancaman besar terhadap demokrasi. Keterbukaan terhadap pasar dan liberalisasi ekonomi yang berimplikasi pada aliran modal yang seluas-luasnya, tidak hanya pada dataran nasional, namun juga internasional, menyebabkan bermunculannya perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations-MNC*). Keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional disuatu negara, tidaklah bertanggung jawab terhadap negara tersebut ataupun terhadap negara asalnya, tetapi keberadaannya lebih dilatarbelakangi oleh insting mengeruk laba yang sebesar-besarnya. Perusahaan-perusahaan ini bebas menempatkan cabang produksinya di negara manapun. Mendirikan kantor pusat di negara maju atau negara asalnya, dan mendirikan pabrik di negara lainnya, dimana ia bisa mendapat akses terhadap buruh murah, bahan mentah yang melimpah, biaya produksi lebih rendah, dan pajak yang lebih ringan, dengan lebih bebas dan mudah. Dengan

... .. perusahaan-perusahaan multinasional ini

semakin memiliki kekuasaan yang hegemonik. Pada saat yang kritis, mereka dapat mengubah modal mereka yang begitu besar, menjadi alat *bargaining power*. Dominasi korporasi terhadap negara merupakan sebuah ironi, dimana perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya tunduk kepada otoritas politik tempat mereka berada, namun yang terjadi malah sebaliknya. Korporasi ini, dengan kekuatan modalnya, menyediakan dana yang besar untuk melakukan lobi-lobi politik kepada pejabat pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nantinya tidak akan merugikan perusahaan. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan perusahaan, korporasi ini mengancam akan mencabut investasi mereka, yang akan menyebabkan kemunduran ekonomi di negara tersebut. Dengan demikian, orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat, malah mampu mendiktekan kebijakan yang harus diambil oleh penguasa negara yang mendapat mandat dari rakyat. Hal ini tentunya mengancam demokrasi politik, demokrasi berubah menjadi oligarki, dimana kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir/sekelompok kecil orang, yakni para pemegang modal.

Makna demokrasi pun semakin tereduksi oleh berjayanya segelintir perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar, seperti General Motor, Nestle, Phillip Morris inilah yang sebagian besar menguasai produk-produk kebutuhan hidup konsumen dan kekayaan dunia. Kenyataan ini menjadikan pasar cenderung tidak lagi kompetitif, melainkan lebih monopolistik dan oligopolistik¹⁹ yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan padat modal.

¹⁹ Monopoli merupakan suatu keadaan tanpa persaingan, dimana persediaan suatu barang tertentu dipegang oleh satu pihak saja, sedangkan oligopoli adalah keadaan pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen sehingga mereka atau salah satu dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar

Sedangkan perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan-perusahaan kecil semakin tidak berdaya. Demokrasi ekonomi yang dijanjikan pun semakin menjauh dari alam Neoliberalisme. Sungguh sebuah ironi, dimana demokrasi menjanjikan keadilan sosial, tetapi tergerus oleh pasar yang menjanjikan kebebasan individu untuk meraih keuntungan. Disisi lain, dominasi ideologi Neoliberalisme sebagai rezim ekonomi internasional, yang dipenetrasikan oleh hegemoni negara-negara adidaya seperti Amerika - yang memiliki kepentingan besar terhadap perdagangan bebas dan investasi global - melalui organisasi keuangan internasional seperti WTO dan IMF, yang tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan dalam sistem perdagangan internasional, namun juga menjalankan fungsi *surveillance* terhadap negara-negara. Disinilah terlihat, seakan tidak ada pilihan lain bagi negara, selain mengikuti menjalankan prinsip-prinsip Neoliberalisme, atau terkucil dalam pergaulan internasional.

Noam Chomsky selain dikenal sebagai seorang pakar linguistik, ia juga dikenal sebagai pemerhati sosial dan politik yang kritis. Sejak tahun 1965 hingga kini, Chomsky menjadi salah satu tokoh intelektual yang paling kritis terhadap kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Pendapatnya yang sering berbeda dengan pendapat umum dan memberikan perspektif dan arti baru terhadap peristiwa-peristiwa, seringkali mengundang pro dan kontra atas pemikirannya. Noam Chomsky selalu terpacu untuk mencari makna yang sebenarnya dalam gagasan

Noam Chomsky adalah salah satu tokoh intelektual garda depan yang menentang penerapan prinsip-prinsip Neoliberalisme. Kontribusi terbesar Chomsky adalah kepeduliannya terhadap demokrasi. Ia menekankan dorongan kearah demokrasi yang mendasar pada masyarakat dunia. Demokrasi bagi Noam Chomsky adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Noam Chomsky menyetujui pendapat Alexis de Tocqueville bahwa kesetaraan pendapatan merupakan ciri penting masyarakat yang bebas dan adil, yang merupakan ciri demokrasi.

Selanjutnya, dalam pandangan Noam Chomsky, terdapat sebuah "arena publik" di mana, secara prinsip, individu dapat berpartisipasi dalam keputusan yang melibatkan masyarakat umum, misalnya saja mengenai pajak, ataupun kebijakan luar negeri. Demokrasi berfungsi sejauh individu dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam arena publik, baik secara individual maupun kolektif, tanpa campur tangan tidak sah dari pemegang kekuasaan. Terlaksananya demokrasi memerlukan kesetaraan relatif dalam hal akses sumber daya manusia, materi, informasi, dan lainnya. Namun sayangnya, demokrasi yang kita temui saat ini jauh dari pengertian yang sebenarnya. Kekuasaan korporasi menggeser peran masyarakat dalam tingkat yang minimal, dengan penguasaan atas modal, sumber daya alam, informasi yang menyebabkan semakin terbatasnya akses masyarakat terhadapnya dan semakin tingginya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kondisi kesenjangan yang semakin parah inilah, menurut Chomsky yang dapat mengancam berlangsungnya demokrasi. Chomsky mengambil contoh mengenai

melaporkan kejadian yang sebenarnya serta yang berfungsi sebagai pembela masyarakat melawan penguasa yang semena-mena dapat mendorong terjadinya demokratisasi. Namun hal tersebut tidak terjadi, melainkan pers menyiarkan beritanya sesuai dengan keinginan para pemegang modal.

Noam Chomsky mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang bersimpati terhadap tradisi anarkis. Secara umum, Anarkisme diartikan sebagai paham yang mempercayai segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga yang menumbuhkan tindakan kekerasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan, dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa hirarkis²⁰. Noam Chomsky memang berpendapat bahwa masyarakat harus terbebas dari segala bentuk paksaan (koersi) pemerintah atau penguasa, namun dalam pandangan Chomsky pula, penghapusan negara bukanlah suatu jalan terbaik. Pemerintah tetap diperlukan, karena pemerintah, bagaimanapun juga memainkan peran sentral dalam mengatur (peran manajemen) negara, misalnya saja dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dalam hal ini, Chomsky mengacu pada pendapat Adam Smith, dimana pemerintah bisa mengambil tindakan untuk mencegah dorongan destruktif yang diakibatkan oleh kegagalan pasar. Dengan kata lain, Chomsky menyetujui prinsip Negara Kesejahteraan, dimana negara bertanggung jawab atas penyediaan jaminan sosial bagi warga negara.

Bagi Chomsky, anarkisme bukan tentang kecilnya peran pemerintah yang terorganisir, melainkan suatu bentuk organisasi yang berbeda karena tidak ada

hierarki. Organisasi tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial ini akan menjadi alternatif bagi institusi koersif dan kekuasaan negara yang terpusat.

Konsistensi pemikiran Noam Chomsky terhadap demokrasi memang telah menarik simpati dari banyak kalangan. Di Amerika Serikat, Noam Chomsky dikenal sebagai kritikus terkemuka terhadap berbagai pemerintahan dan kebijakan Amerika Serikat baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Sebagai seorang yang beraliran libertarian-sosialis, Noam Chomsky beranggapan bahwa kekerasan selalu memiliki unsur legitimasi atau kekuasaan. Upaya unilateralisme Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Dalam pandangannya, kekerasan atau perang yang terjadi di dunia ini pada dasarnya berasal dari kepemimpinan negara-negara Super Power. Negara *Major Power* berusaha mengatur dunia agar sesuai dengan kepentingan mereka, dengan menggunakan kekuatan militer (termasuk intervensi politik maupun kekerasan secara langsung; perang) maupun ekonomi. Noam Chomsky menekankan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada dasarnya dapat dijelaskan oleh adanya dominasi kepentingan bisnis Amerika Serikat dan serta penguatan sistem negara kapitalis.

Dengan demikian, menurut Chomsky, Amerika Serikat telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi, yang ironisnya menjadi seruan dan agenda politik Amerika terhadap negara-negara lain. Penerapan demokrasi di negara lain

untuk memperkuat sistem pasar terbuka, yang memungkinkan ekspansi perusahaan swasta Amerika Serikat di negara tujuan tersebut.

D. Pokok Permasalahan

Berdasar latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, pokok masalah yang akan dibahas adalah mengapa Noam Chomsky mengkritik bahwa neoliberalisme mengancam demokrasi dari sisi :

- a. Proses penyebaran neoliberalisme.
- b. Dampak Penyebaran Neoliberalisme, dan
- c. Struktur Neoliberalisme

E. Kerangka Dasar Teori/Landasan Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan, diperlukan kerangka pemikiran sebagai suatu acuan. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang dapat memberitahukan kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Dengan demikian, selain digunakan untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi²¹.

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan dua teori, yakni satu dari Chomsky yang ia sering kemukakan dan bahas dalam berbagai tulisannya, baik artikel, teks seminar, dan lain sebagainya sebagai. Teori yang dimaksud tersebut adalah Teori Efek Domino (*Effect Domino Theory*) dan yang selanjutnya adalah teori hegemoni. Teori Efek Domino mencoba melihat suatu mekanisme dalam pengkonstruksian neoliberalisme dalam tatanan global. Teori hegemoni hendak

digunakan untuk menganalisa neoliberalisme sebagai suatu bentuk hegemoni negara super power terhadap negara dunia ketiga.

1. Teori Efek Domino (*Domino Effect Theory*)

Teori Efek Domino sebenarnya digulirkan Chomsky dalam melihat kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Penulis mengakui keterbatasan materi dalam pembahasan teori ini, namun penjelasan singkat ini diharapkan bisa memberikan sedikit gambaran mengenainya. Pada dasarnya, Teori Efek Domino melihat suatu kebijakan, dimana implikasi kebijakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap satu hal, melainkan berbagai hal. Menurut Ensiklopedia Wikipedia, Efek Domino mengacu pada suatu perubahan kecil, yang akan menyebabkan perubahan yang sama, yang kemudian akan menyebabkan perubahan lain yang sama, dan seterusnya dalam rangkaian atau rentetan yang linear, yang dianalogikan seperti jatuhnya barisan kartu domino hingga akhir. Efek Domino juga terkait dengan peristiwa berantai.²²

Pada mulanya kebijakan Efek Domino ini dijalankan oleh Amerika semasa Perang Dingin untuk menghalau pengaruh komunisme Uni Soviet. Ini adalah strategi AS dalam menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Dasar implementasi Teori Efek Domino ini adalah spekulasi yang menyatakan bahwa jika suatu area dikuasi oleh komunisme, maka daerah-daerah atau negara-negara di sekitarnya akan terpengaruh juga, setidaknya mengikuti *tetangga* mereka. Sebagaimana yang dikatakan Presiden Eisenhower mengenai komunis di Indocina. Meskipun Eisenhower tidak menggunakan istilah 'teori domino' secara langsung namun, ia

disebut-sebut sebagai tokoh teori efek domino ini. Eisenhower, dalam konferensi pers pada tanggal 7 April 1954 beragumen bahwa jika pihak komunis berhasil mengambil alih seluruh Indocina, maka kelompok-kelompok lokal akan memiliki dorongan, dukungan materi dan momentum untuk mengambil alih Burma, Thailand, Malaysia (Malaya), dan Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka akan memberi keuntungan ekonomi dan geografis kepada komunis, dan hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi Amerika, karena kehilangan suatu wilayah atau region berarti kehilangan area perdagangan.

Hal ini kemudian menjadi pembenaran intervensi AS di seluruh dunia. Contoh implementasi kasus ini semasa Perang Dunia Kedua adalah agresi militer terhadap Vietnam, dengan alasan untuk mencegah Vietnam masuk dalam pengaruh komunis Uni Soviet. Alasan intervensi ini adalah negara komunis akan memberi dukungan dan bantuan bagi gerakan-gerakan revolusioner komunis di negara-negara tetangganya. Misalnya saja, Cina yang menyuplai Vietminh, tentara Vietnam Utara, berupa senjata, pasukan dan senjata berat lainnya, seperti tank, dan lain sebagainya. Jika Vietnam tidak dicegah, maka besar kemungkinan bahwa negara-negara tetangga atau bahkan kawasan Asia Tenggara akan tunduk dalam pengaruh komunis.

Dalam pandangan Chomsky, teori efek domino bukan sekedar karena masalah menyebarkan komunisme, tetapi ini adalah strategi perebutan area perdagangan. Ini berarti bukan sekedar masalah politik, tetapi juga ekonomi. Misalnya saja dalam kasus Indocina, jika rakyat di Indocina merdeka, maka rakyat Thailand akan mendapat kemerdekaan dan kedaulatan pula, serta mungkin hal yang

sama akan terjadi di negara-negara lainnya. Ini akan menyebabkan Amerika dan Sekutu akan kehilangan pasar. Dalam menjelaskan teori domino ini, Chomsky seringkali menyebut istilah *the threats of Good Example* atau ancaman dari para contoh yang bagus. Demokrasi merupakan peralatan yang tepat sebagai alasan implementasi teori ini. Tuduhan tidak demokratis suatu negara, yang pada akhirnya menjadi pembenaran agresi militer AS, disisi lain menurut Chomsky tuduhan itu bisa jadi rekayasa belaka. Misalnya Guatemala yang berhasil melaksanakan reformasi agraria, dikhawatirkan menyebabkan negara-negara tetangganya seperti Honduras akan menerapkan hal yang sama. Ini akan merugikan ekonomi AS, sehingga Guatemala sebagai 'contoh baik' menjadi ancaman yang harus segera diatasi.

2. Teori Hegemoni (Hegemony Theory)

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno, disebut sebagai 'eugenomonia', sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britannica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar.²³

Hegemoni dalam pandangan kaum marxist pada umumnya menunjuk pada relasi kaum proletar dan kelompok lainnya. Hegemoni dalam kepustakaan marxist didefinisikan sebagai kepemimpinan kaum proletar dengan aliansi-aliansinya yang sama-sama bertujuan menjatuhkan pemerintahan (pada tahun 1880-an ditujukan untuk menggalang kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar di Rusia).

Namun dalam pandangan Antonio Gramsci, istilah hegemoni merupakan sebuah konsep untuk menjelaskan supremasi satu kelompok atau lebih atas kelompok lainnya, baik dengan menggunakan cara kekerasan maupun bentuk-bentuk persuasi.

Gramsci membedakan antara dominasi dan hegemoni, dimana dominasi mengacu pada suatu bentuk supremasi yang ditopang oleh kekuatan fisik, atau dengan kata lain hubungan kekuasaan tersebut mengacu pada penggunaan kekuatan koersi secara langsung. Sedangkan hegemoni mengacu pada kepemimpinan intelektual dan moral (bersifat persuasi). Kepemimpinan secara moral dan intelektual ini sesungguhnya dibangun melalui mekanisme konsensus²⁴, dimana konsensus ini diekspresikan oleh apa yang disebut dengan organ opini publik, melalui koran maupun asosiasi-asosiasi masyarakat. Melalui opini publik tersebut, kelompok penguasa berusaha mendifusikan sistem nilai, ide-ide, kepercayaan, maupun moral mereka kedalam setiap sendi kehidupan, yang tujuannya adalah penerimaan nilai-nilai tersebut oleh kelompok-kelompok subordinat sebagai nilai bersama, atau *common sense*.

Persetujuan bersama atas suatu nilai yang telah disepakati inilah yang merupakan konsensus tadi. Jika kelompok penguasa mendapatkan persetujuan tersebut dari kelompok subordinasi, maka hubungan hegemonik dapat diciptakan. Dalam tahapan ini, kelompok subordinasi telah menginternalisasikan nilai-nilai kelompok penguasa sebagai nilai-nilai, norma maupun budaya mereka sendiri, sehingga legitimasi kelompok penguasa tidak lagi ditentang berdasarkan suatu

²⁴ konsensus sendiri, adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama melalui pendapat, pendirian sikap

nilai, kultur maupun secara moral. Dengan demikian, dalam pandangan Gramscian, tindakan koersif merupakan tindakan alternatif atau tindakan terakhir jika tindakan persuasif menemui kegagalan.

Persemaian ide-ide dan kultur kelompok-kelompok yang berkuasa memainkan peran yang sangat penting dalam rangka mencapai maupun memantapkan hegemoni kelompok tersebut:

Ide dan opini tidak 'lahir' secara spontan dalam benak tiap individu: keduanya mempunyai pusat informasi, iradiasi, persebaran, persuasi-sekelompok orang, atau bahkan individu tunggal, yang mengembangkan dan menghadirkan keduanya dalam bentuk realitas politik mutakhir.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hegemoni suatu kelompok penguasa atas kelompok-kelompok subordinat lainnya bukan dari dominasi kekuatan, melainkan kelompok penguasa tersebut harus mampu membuat ide-ide, budaya, maupun pandangan politiknya diterima dan diinternalisasikan oleh kelompok subordinat. Hegemoni diraih melalui upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual untuk agar nilai-nilai yang dimaksud tercipta sebagai sebuah pandangan dunia, artinya prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut harus diuniversalkan, agar nilai-nilai, prinsip-prinsip maupun kepentingan politik penguasa dianggap sebagai kepentingan bersama oleh kelompok subordinat..

F. Hipotesa

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka teori maka dapat ditarik hipotesa penelitian ini adalah:

1. Menurut Chomsky, neoliberalisme merupakan suatu kondisi yang memang dikonstruksikan oleh, khususnya Amerika Serikat.

Neoliberalisme merupakan kelanjutan episode usaha penguasaan pasar dunia oleh Amerika. Intervensi terhadap suatu negara akan memberikan kesempatan Amerika untuk meruntuhkan negara yang dianggap tidak bisa bekerja sama untuk membuka diri terhadap pasar bebas dan penerapan konsep-konsep neoliberalisme.

2. Neoliberalisme semakin menyempitkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya, karena kepemilikan yang monopolistis oleh korporasi, sehingga terjadinya defisit demokrasi dalam kepemimpinan ideologi ini. Neoliberalisme menyebabkan semakin tertutupnya arena publik bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan proses pembuatan keputusan.

3. Neoliberalisme merupakan suatu paham ekonomi yang penuh dengan paradoks dan kontradiksi di dalam strukturnya. Struktur neoliberalisme diciptakan sebagai usaha lanjutan penguasaan kesejahteraan dan ekonomi oleh negara maju. Konsep-konsep didalamnya pun penuh dengan kontradiksi dengan dampak yang ditimbulkannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar,

Penelitian ini bersifat deskripsi yang menggambarkan atau mendeskripsikan pemikiran Noam Chomsky terhadap neoliberalisme.

3. Pengumpulan Data

Dalam pencarian sumber data, peneliti menggunakan sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer berupa karya-karya orisinal Noam Chomsky, seperti buku-buku dan artikel-artikel dan hasil wawancara beberapa jurnalis dengan Noam Chomsky. Data sekunder berupa ulasan dan komentar terhadap karya utama Noam Chomsky oleh para penulis lainnya.

4. Analisis Data

Data-data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menelaah kasus-kasus umum secara seksama samapi menemukan suatu pola dalam banyak kasus dan kemudian mengembangkan suatu prinsip hubungan khusus.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Discourse Analysis (DA)*. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang menganalisa bahasa dengan menitik-perhatian pada kalimat atau level klausa sebagai representasi fenomena sosial.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jangkauan pemikiran Noam Chomsky dalam bidang ekonomi-politik, yakni mengenai neoliberalisme,

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I Pendahuluan terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori (landasan teori), hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DEMOKRASI

Dalam bab II penulis membahas mengenai demokrasi. Ada dua teorisasi demokrasi, yakni demokrasi substantivist dan prosedural yang di cantumkan pada awal bab. Sub bagian selanjutnya penulis sedikit menguraikan tentang arti demokrasi, dilanjutkan dengan demokrasi liberal, dan terakhir ancaman-ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Bab ini penulis tulis cukup singkat.

BAB III NEOLIBERALISME

Bab III penulis khususkan untuk membahas tentang neoliberalisme. Di bab ini, penulis akan membahas tentang sejarah neoliberalisme, yang terdiri dari tiga poin utama, termasuk tentang pengertian neoliberalisme. Penulis juga membahas tentang kebijakan-kebijakan neoliberalisme sebagai pemahaman lebih lanjut tentang neoliberalisme. Pada sub bagian selanjutnya, penulis membahas tentang penyebaran neoliberalisme, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Di bagian ini juga penulis sedikit membahas tentang peran lembaga-lembaga keuangan global dalam proses penyebaran neoliberalisme. Dan terakhir, penulis

hegemoni dari negara-negara maju, tentunya saya menggunakan perspektif teori hegemoni Gramsci. .

BAB IV KRISIS DEMOKRASI DALAM KEPEMIMPINAN NEOLIBERALISME (KRITIK NOAM CHOMSKY TERHADAP NEOLIBERALISME)

Bab IV merupakan bagian pembahasan mengenai Noam Chomsky. Secara garis besar, bab ini terdiri dari tiga sub bahasan utama, yakni pemikiran politik Noam Chomsky. Penulis sedikit mengelaborasi beberapa pemikiran politik Noam Chomsky, misalnya propaganda media massa, dan pandangan Chomsky terhadap demokrasi. Sub bahasan kedua, penulis memfokuskan pada kritik-kritik Noam Chomsky terhadap neoliberalisme, dan sub bahasan ketiga membahas korelasi krisis demokrasi dan neoliberalisme, tentunya berdasarkan pada

... Chomsky telah dibahas sebelumnya

Neoliberalisme semakin menjadi hal yang *debatable*, didorong oleh berbagai gerakan anti-neoliberalisme. Rongrongan agen neoliberalisme terhadap negara berkembang untuk menganut ideologi ini menjadi sasaran kritik terhadap neoliberalisme sebagai agenda politik dan ekonomi negara super power yang menghendaki universalisasi pasar bebas pun semakin tidak terelakkan. Selain itu, Neoliberalisme kini menjadi *discourse* yang dominan dalam Studi Pembangunan maupun Ekonomi Politik Internasional. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis termotivasi untuk membahas mengenai Neoliberalisme dalam skripsi ini, dengan judul "*Krisis Demokrasi Dalam Kepemimpinan Neoliberalisme (Kritik Noam Chomsky Terhadap Neoliberalisme)*"

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian penulisan ini yaitu ingin memberikan gambaran tentang:

Pertama, untuk menganalisa pandangan Noam Chomsky terhadap prinsip-prinsip ekonomi Neoliberalisme dan dampaknya terhadap demokrasi

Kedua, juga mempunyai tujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis peroleh di bangku kuliah. Teori apa yang pantas untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung.

Ketiga, tujuan penulisan skripsi ini adalah syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta